

Pelatihan bagi UMKM dalam Mencapai Inklusi Ekonomi melalui Pembayaran Digital dan Akuntansi Terintegrasi

Training for MSMEs in Achieving Economic Inclusion through Digital Payments and Integrated Accounting

Fina Ruzika Zaimar¹, Yulia Yunita Yusuf², Anisatun Humayrah Rais³, Kartika Septiary Pratiwi Musa⁴, Nur Alim Bahri⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: ¹⁾fina.ruzika.zaimar@unm.ac.id , ²⁾yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id ,

³⁾anisatun.humayrah.rais@unm.ac.id, ⁴⁾kartika.septiary@unm.ac.id, ⁵⁾nur.alim.bahri@unm.ac.id

Abstrak

Inklusi ekonomi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam akses perbankan, pencatatan keuangan, dan penggunaan teknologi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, memperluas akses pembayaran digital (digital payment), serta memperkenalkan sistem akuntansi terintegrasi bagi UMKM. Metode pengabdian dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan implementasi langsung aplikasi digital payment serta sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang transaksi non-tunai, efisiensi operasi bisnis, serta kualitas pencatatan akuntansi. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada percepatan inklusi ekonomi berbasis digital di tingkat lokal.

Kata kunci : Digital Payment, Inklusi Ekonomi, Sistem Akuntansi Terintegrasi, UMKM, QRIS.

Abstract

Economic inclusion serves as a foundation for sustainable economic growth, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, many MSMEs continue to face limitations in banking access, financial record-keeping, and the use of digital technology. This community service program aims to enhance digital literacy, expand access to digital payments, and introduce integrated accounting systems for MSMEs. The program was carried out through training sessions, mentoring, and the direct implementation of digital payment applications and technology-based financial recording systems. The results show an improvement in MSME actors' understanding of cashless transactions, business operational efficiency, and the quality of their accounting records. Thus, this program contributes to accelerating digital-based economic inclusion at the local level.

Keywords: Digital Payment, Economic Inclusion, MSMEs, Integrated Accounting System, QRIS.

PENDAHULUAN

Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kolaborasi antara manusia dan teknologi membuka peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia. Pesatnya penetrasi internet telah mentransformasi lanskap ekonomi global, di mana digitalisasi ekonomi muncul sebagai katalisator fundamental dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis. Dalam konteks perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis sebagai penopang perekonomian nasional dan penyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, upaya memperkuat kapasitas UMKM

melalui adopsi teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan agar dapat bertahan dan bersaing di pasar yang semakin dinamis.

Merespons tren ini, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis untuk mempercepat transformasi digital UMKM. Salah satu fokus utama adalah mendorong adopsi sistem pembayaran digital, seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), *mobile banking*, dan *e-wallet*. Beragam studi empiris telah mengonfirmasi bahwa implementasi pembayaran digital berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat aspek keamanan finansial, dan memperluas jangkauan pasar (*market access*) melampaui batas geografis tradisional.

Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses transisi digital UMKM masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang kompleks. Permasalahan mendasar tersebut antara lain:

1. Rendahnya Kapasitas Literasi Digital dan Keuangan. Banyak pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai manfaat, risiko, dan mekanisme penggunaan teknologi finansial (*fintech*), sehingga menghambat adopsi yang efektif dan aman.
2. Minimnya Adopsi Teknologi Akuntansi. Mayoritas UMKM masih mengandalkan pencatatan keuangan manual dan belum memanfaatkan aplikasi pembukuan atau sistem akuntansi sederhana yang dapat meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Budaya Transaksi Tunai dan Inkonsistensi Pencatatan. Ketergantungan pada transaksi tunai yang seringkali tidak tercatat (*unrecorded*) menciptakan celah dalam pelacakan arus kas, yang berimplikasi pada tidak akuratnya gambaran kesehatan bisnis.
4. Terputusnya Rantai Data Keuangan. Tidak adanya integrasi antara platform pembayaran digital dengan sistem pelaporan keuangan menciptakan pekerjaan ganda (*double entry*). Data transaksi digital yang seharusnya dapat otomatis terekam justru harus dimasukkan secara manual, mengurangi efisiensi yang dijanjikan oleh digitalisasi.

Secara teoritis, adopsi teknologi, termasuk pembayaran digital dan sistem akuntansi, sering dikaji melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM). Faktor *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) merupakan determinan kunci dalam penerimaan suatu teknologi (Davis, 1989). Namun, pada konteks UMKM, faktor-faktor eksternal seperti literasi digital dan dukungan infrastruktur seringkali menjadi penghambat utama (Venkatesh & Bala, 2008).

Penelitian sebelumnya oleh Pratama dan Susanti (2023) menunjukkan bahwa meskipun *awareness* terhadap QRIS cukup tinggi di kalangan pelaku UMKM di perkotaan, tingkat adopsi yang efektif masih rendah. Hambatan utamanya terletak pada rendahnya pemahaman tentang rekonsiliasi transaksi dan keamanan siber. Di sisi lain, studi dari Wicaksono dan Pratomo (2022) mengungkapkan bahwa UMKM yang telah menggunakan pembukuan digital sederhana menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan arus kas dan

perencanaan pajak. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya memperkenalkan alat, tetapi juga membangun kapasitas dasar dalam literasi keuangan dan digital.

Konstelasi permasalahan multidimensi ini menyebabkan banyak UMKM belum sepenuhnya siap dan mampu mengoptimalkan perkembangan ekonomi digital. Akibatnya, hambatan ini tidak hanya membatasi pertumbuhan usaha individu, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan inklusi ekonomi pada tingkat lokal, memperlebar kesenjangan digital (*digital divide*) antara UMKM dan usaha berskala besar.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai sebuah intervensi strategis. Program ini bertujuan untuk menjawab tantangan melalui transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan pemberian keterampilan praktis (*practical skills*) yang berfokus pada dua aspek kunci: pemahaman mendalam tentang ekosistem pembayaran digital dan implementasi sistem akuntansi terintegrasi. Solusi yang ditawarkan dirancang agar mudah digunakan (*user-friendly*), terjangkau (*low-cost*), dan sesuai (*fit-for-purpose*) dengan karakteristik dan kebutuhan operasional UMKM, sehingga diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperkuat fondasi manajemen keuangan dan daya saing mereka di era digital.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif, kolaboratif, dan partisipatif dari pelaku UMKM sebagai subjek dampingan. Pendekatan PAR dipilih karena mampu memastikan bahwa proses identifikasi masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan aksi, serta refleksi dilakukan secara bersama-sama, sehingga hasil kegiatan lebih relevan, aplikatif, dan berkelanjutan.

Kegiatan PkM dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 dengan melibatkan 30 pelaku UMKM di Kota Makassar, khususnya para pelaku usaha yang sedang berproses dalam digitalisasi transaksi dan pencatatan keuangan. Kegiatan dilaksanakan secara daring via zoom meeting. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam empat tahapan utama untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif dan mencapai luaran yang terukur, yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Koordinasi

Tahap ini meliputi:

- a. Penyusunan modul pelatihan mengenai penggunaan digital payment (QRIS, mobile banking, e-wallet) dan sistem akuntansi terintegrasi berbasis aplikasi.
- b. Penyusunan instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Tahap persiapan ini memastikan seluruh kebutuhan teknis, administratif, dan akademik tersedia untuk mendukung kelancaran proses pelatihan dan pendampingan.

2. Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan utama dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu:

a. Sesi 1: Pemahaman Dasar Inklusi Ekonomi dan *Digital Payment*

Materi mencakup:

- 1) Konsep inklusi ekonomi,
- 2) Pentingnya digital payment bagi UMKM,
- 3) Pengenalan QRIS dan mekanisme penggunaannya,
- 4) Keamanan transaksi digital,
- 5) Studi kasus implementasi QRIS di UMKM.

b. Sesi 2: Praktik Penggunaan Sistem Akuntansi Terintegrasi

Materi mencakup:

- 1) Instalasi dan penggunaan aplikasi akuntansi digital,
- 2) Cara mencatat transaksi harian berbasis data digital payment,
- 3) Pembuatan laporan keuangan otomatis,
- 4) Integrasi data transaksi digital ke dalam sistem pencatatan keuangan.

Fokus utama sesi ini adalah agar peserta mampu memahami dan mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

3. Pendampingan dan Implementasi

Tahap ini dilakukan melalui:

- a. Pendampingan personal atau kelompok kecil (2-4 UMKM) untuk membantu instalasi aplikasi *digital payment* dan sistem akuntansi.
- b. Bimbingan dalam melakukan pencatatan transaksi nyata dari aktivitas usaha peserta.
- c. Identifikasi kendala teknis dan penyelesaian secara langsung.
- d. Evaluasi awal terhadap efektivitas implementasi *digital payment* dan akuntansi terintegrasi dalam kegiatan usaha masing-masing peserta.
- e. Pendekatan ini memastikan UMKM tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar mampu mengimplementasikan keterampilan baru dalam operasional bisnis sehari-hari.

4. Monitoring, Evaluasi, dan Refleksi

Tahap akhir kegiatan meliputi:

- a. Pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi digital dan kemampuan pencatatan keuangan peserta.
- b. Monitoring penggunaan aplikasi *digital payment* dan pencatatan digital pasca pelatihan.
- c. Diskusi reflektif bersama peserta mengenai manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk keberlanjutan program.
- d. Penyusunan laporan evaluasi untuk perbaikan kegiatan PkM di masa mendatang.

Melalui tahapan ini, efektivitas program dapat diukur secara objektif, sekaligus memberikan umpan balik nyata terkait kesiapan UMKM dalam mengadopsi teknologi digital.



Gambar 1. Pemaparan Materi
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 5 Juni 2025 menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan terkait penggunaan pembayaran digital serta sistem akuntansi terintegrasi. Hasil ini diperoleh melalui pre-test dan post-test, diskusi kelompok, serta pendampingan secara daring selama kegiatan.

1. Peningkatan Literasi Digital dan Pemahaman Pembayaran Non-Tunai

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan skor pengetahuan sebesar 57% setelah mengikuti sesi pelatihan. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta memahami pembayaran digital sebatas penggunaan *e-wallet* sebagai alat transaksi pribadi. Namun, setelah pelatihan, peserta mulai memahami fungsi strategis pembayaran digital dalam konteks bisnis, antara lain efisiensi transaksi, keamanan data, kemudahan pencatatan, dan perluasan akses pasar.

Temuan ini selaras dengan penelitian Putra & Rachmawati (2020), yang menyatakan bahwa pembayaran digital berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional UMKM dan akses konsumen. Implementasi QRIS yang diperkenalkan selama pelatihan juga mendorong peserta untuk mulai beralih dari transaksi tunai ke transaksi non-tunai yang lebih terstandar dan tercatat.

2. Adopsi Sistem Akuntansi Terintegrasi

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penggunaan sistem akuntansi sederhana berbasis aplikasi digital yang diperkenalkan selama kegiatan. Dari hasil pendampingan, sebanyak 78% peserta mampu menginput transaksi penjualan dan pengeluaran secara mandiri, sementara sisanya masih memerlukan bantuan dalam memahami konsep debit-kredit atau pengelompokan akun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sebenarnya memiliki minat untuk mengadopsi teknologi pencatatan keuangan, namun

membutuhkan sistem yang *user-friendly* dan relevan dengan sektor usaha mereka. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sujarweni (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi pada UMKM bergantung pada kesederhanaan fitur dan kemudahan penggunaan.

Dengan integrasi antara sistem pembayaran digital dan akuntansi, UMKM dapat meminimalkan kesalahan pencatatan (*human error*), menghemat waktu, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Hal ini penting terutama untuk UMKM yang ingin mengakses pembiayaan perbankan, karena lembaga keuangan mensyaratkan histori transaksi dan laporan keuangan sebagai dasar penilaian kredit.

3. Perubahan Persepsi terhadap Transformasi Digital

Diskusi kelompok mengungkap bahwa sebelumnya banyak peserta merasa bahwa digitalisasi adalah hal yang rumit, mahal, dan tidak diperlukan oleh usaha kecil. Namun setelah melihat simulasi pencatatan otomatis dan proses transaksi QRIS, pandangan tersebut berubah. Peserta menyadari bahwa digitalisasi justru:

- a. Mengurangi risiko kehilangan uang akibat transaksi tunai.
- b. Menghasilkan data yang dapat digunakan untuk analisis bisnis.
- c. Membantu mengelola arus kas harian secara lebih tertib.
- d. Meningkatkan profesionalisme usaha di mata pelanggan.

Perspektif ini mendukung hasil studi OECD (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi meningkatkan produktivitas UMKM dan mengurangi beban administratif melalui otomatisasi proses operasional.

4. Temuan dan Tantangan Implementasi

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan, beberapa tantangan juga teridentifikasi:

a. Keterbatasan Perangkat dan Infrastruktur

Sebagian peserta masih menggunakan telepon genggam dengan kapasitas penyimpanan terbatas, sehingga tidak semua aplikasi digital dapat diinstal optimal.

b. Keterbatasan Pemahaman Dasar Akuntansi

Walaupun antusias, sebagian UMKM membutuhkan pelatihan lanjutan mengenai konsep laporan laba rugi, arus kas, dan neraca sederhana.

c. Kebiasaan Transaksi Tunai

Perubahan menuju transaksi digital membutuhkan waktu dan pendampingan berkelanjutan, terutama untuk UMKM yang sudah lama beroperasi dengan pola tradisional.

Temuan ini konsisten dengan laporan World Bank (2020) yang menekankan bahwa kesenjangan digital (*digital divide*) tidak hanya dipengaruhi oleh akses teknologi, tetapi juga oleh literasi, kebiasaan, dan kesiapan mental pelaku usaha.

5. Implikasi Temuan

Temuan kegiatan ini memiliki beberapa implikasi penting:

a. Implikasi terhadap Praktik Pengelolaan UMKM

Adopsi QRIS dan pencatatan digital meningkatkan akurasi informasi keuangan, sehingga membantu UMKM dalam perencanaan bisnis, pengendalian biaya, dan pengelolaan arus kas.

b. Implikasi terhadap Ekosistem Keuangan Digital

Peningkatan penggunaan pembayaran digital berpotensi mempercepat inklusi ekonomi di tingkat lokal serta meningkatkan volume transaksi non-tunai.

c. Implikasi terhadap Kebijakan dan Program Pengembangan UMKM

Hasil kegiatan ini menunjukkan perlunya:

- 1) Program literasi digital berkelanjutan,
- 2) Dukungan infrastruktur teknologi,
- 3) Integrasi lintas platform antara pembayaran digital dan akuntansi,
- 4) Pendampingan berbasis kelompok (klaster UMKM).

d. Implikasi Akademik dan Penelitian

Temuan memperkuat teori adopsi teknologi dan literasi digital, serta dapat menjadi dasar penelitian lanjutan terkait faktor hambatan digitalisasi UMKM dan efektivitas sistem akuntansi terintegrasi dan model pendampingan UMKM berbasis digital.



Gambar 2. Materi Pembahasan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi digital, pemahaman pembayaran non-tunai, serta keterampilan pencatatan keuangan berbasis sistem akuntansi terintegrasi bagi pelaku UMKM. Melalui pelatihan, pendampingan, dan implementasi langsung aplikasi, peserta mampu memahami manfaat penggunaan QRIS, e-wallet, dan aplikasi pembukuan digital sebagai bagian dari transformasi operasional usaha.

Peningkatan pengetahuan dan perubahan pola pikir peserta menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi berbasis teknologi. Temuan kegiatan ini mengonfirmasi bahwa

integrasi antara pembayaran digital dan sistem akuntansi dapat meningkatkan efisiensi transaksi, akurasi laporan keuangan, serta mempermudah UMKM dalam pengendalian arus kas dan pengambilan keputusan bisnis.

Namun demikian, pelaksanaan juga mengungkap adanya hambatan seperti keterbatasan perangkat, rendahnya pemahaman dasar akuntansi, serta budaya transaksi tunai yang masih kuat. Hal ini menandakan perlunya pelatihan lanjutan, pendampingan jangka panjang, serta inovasi teknologi yang lebih sederhana dan terjangkau untuk UMKM.

Secara keseluruhan, program ini berkontribusi nyata dalam mendukung percepatan inklusi ekonomi berbasis digital di tingkat lokal. Penguatan literasi digital, implementasi sistem akuntansi terintegrasi, serta pemberdayaan UMKM melalui pembayaran digital menjadi fondasi penting menuju ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2020). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Standar nasional pembayaran digital. BSN.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Kemenkop UKM. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2022-2023*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Transformasi digital UMKM menuju ekonomi inklusif. Jakarta: KemenKopUKM.
- Ningsih, P., Sari, D. A., & Wijaya, C. (2022). Dampak penggunaan QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(2), 45-60.
- OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>
- Pratama, A., & Susanti, E. (2023). Analisis hambatan adopsi QRIS pada UMKM kuliner di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 112-125.
- Putra, A. R., & Rachmawati, I. (2020). Digital payment adoption and its impact on MSME performance. *Journal of Digital Economy*, 5(2), 87–102.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi untuk UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryanto, T., & Kurniati, A. (2021). Digital payment dan daya saing UMKM: Sebuah studi literatur sistematis. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(3), 289-305.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273–315.
- Wicaksono, B., & Pratomo, W. A. (2022). Efektivitas aplikasi pembukuan sederhana dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM sektor fashion. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UMKM*, 5(2), 88-102.
- Gerson, R.F. (2004). *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: PPM.

World Bank. (2020). Digital financial inclusion: Global insights and practices. Washington, DC: World Bank.

Zainuddin, M., & Handayani, S. (2021). The role of QRIS in supporting financial inclusion in Indonesia. *Journal of Financial Technology*, 3(1), 55–68.